



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpsn.v4i3.723>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Digital Governance dalam Pengelolaan Dana BOS melalui ARKAS di SMAN 1 Padang

Sindi Dwi Savitri¹, Hade Afriansyah², Hadiyanto Hadiyanto³, Merika Setiawati⁴

¹ Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, Indonesia, sindi271104@gmail.com

² Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, Indonesia, risethadeunp@gmail.com

³ Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, Indonesia, hadiyanto@fip.unp.ac.id

⁴ Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, Indonesia, m3rika18@gmail.com

Corresponding Author: risethadeunp@gmail.com¹

Abstract: *The management of School Operational Assistance funds requires governance that is transparent, accountable, effective, and efficient. The use of the School Activity and Budget Planning application is one effort to implement digital governance in school financial management. This study aims to examine the implementation of digital governance in the management of School Operational Assistance funds through the School Activity and Budget Planning application at SMAN 1 Padang. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data were collected through semi-structured interviews, non-participatory observation, and document analysis involving five informants: the principal, the BOS treasurer, the ARKAS operator, a teacher, and a member of the school committee. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions and verification. The results of the study indicate that planning is conducted in a participatory and data-driven manner; organization is carried out through a BOS management team with a clear division of tasks established via a Decree and tiered coordination; implementation is carried out through multi-layered verification, cashless payments, and digital recording and reporting. Supervision was carried out internally and externally through monitoring by the school principal, the school committee, the education office, and the inspectorate. These findings indicate that ARKAS has made a positive contribution to achieving school financial management that is more transparent, accountable, effective, and efficient.*

Keyword: *Digital Governance, School Operational Assistance Funds, School Activity and Budget Planning Application, transparency, accountability.*

Abstrak: Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemanfaatan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah merupakan salah satu upaya penerapan *digital governance* dalam pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *digital governance* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah di SMAN 1 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi

non-partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap lima informan, yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, operator ARKAS, guru, dan komite sekolah. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan secara partisipatif dan berbasis data, pengorganisasian diwujudkan melalui tim manajemen BOS dengan pembagian tugas yang jelas melalui Surat Keputusan dan koordinasi berjenjang, pelaksanaan dilakukan melalui verifikasi berlapis, pembayaran nontunai, serta pencatatan dan pelaporan digital. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal melalui pemantauan kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, dan inspektorat. Temuan ini menunjukkan bahwa ARKAS telah berkontribusi positif dalam mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien pengelolaan dana, meskipun terdapat kendala berupa adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, kendala Standar Satuan Harga, dan gangguan teknis aplikasi.

Kata Kunci: Digital Governance, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Perkembangan informasi teknologi mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pendidikan. Transformasi ini dikenal dengan konsep *digital governance*, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik. Mergel et al. (2019) menjelaskan bahwa penerapan sistem digital dalam tata kelola organisasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah perencanaan, dan membuat pengawasan anggaran lebih mudah dan transparan. Selanjutnya Criado et al. (2023) menjelaskan bahwa *digital governance* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan proses organisasi, pola pengambilan keputusan, serta penciptaan nilai publik melalui inovasi digital. Mergel et al. (2019) menambahkan bahwa *digital governance* mendorong penerapan tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan yang lincah (*agile*). Dalam konteks pendidikan, implementasi *digital governance* dapat mendukung pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah agar lebih terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Dalam sektor pendidikan, salah satu bentuk penerapan *digital governance* adalah digitalisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan program pemerintah untuk membantu pembiayaan operasional sekolah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengelolaan dana BOS harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai peraturan yang berlaku agar penggunaan anggaran tepat sasaran serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Untuk mendukung pengelolaan dana BOS yang lebih transparan dan akuntabel, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi (2022) mengembangkan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Menurut Afriansyah et al. (2025), sistem pengelolaan sekolah konvensional yang masih manual atau menggunakan sistem digital yang terfragmentasi cenderung memicu inefisiensi administrasi dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, penerapan sistem *digital governance* terintegrasi seperti ARKAS sangat penting untuk menyediakan data keuangan yang akurat dan real-time untuk manajemen sekolah. Melalui aplikasi ini, sekolah dapat mengembangkan rencana anggaran, menerapkan pemanfaatan dana, mengelola dana, dan menyusun laporan pertanggungjawaban dana BOS yang terintegrasi. Kehadiran ARKAS diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi

keuangan sekolah, meminimalkan kesalahan pencatatan, memperkuat mekanisme pengawasan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

Transparansi memungkinkan informasi pengelolaan keuangan dapat diakses dan diawasi oleh para pemangku kepentingan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Meijer (2022) menyatakan bahwa dalam konteks *digital governance*, transparansi tidak hanya diwujudkan melalui keterbukaan informasi, tetapi juga melalui sistem digital yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat dan mudah diakses.

SMAN 1 Padang merupakan salah satu sekolah penerima dana BOS yang telah menerapkan ARKAS sejak tahun 2022. Pada tahun ajaran 2025/2026, sekolah menerima dana BOS sebesar Rp2.007.000.000 untuk 1.338 peserta didik. Implementasi ARKAS telah mendukung proses pengelolaan dana BOS secara digital mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Meskipun sistem digital telah diterapkan, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, antara lain keterlambatan pencairan dana akibat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), keterbatasan item belanja barang dalam Standar Satuan Harga (SSH), dan gangguan teknis pada aplikasi yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program sekolah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana BOS. Adnyani & Astawa (2023) menemukan bahwa penggunaan ARKAS membantu meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaporan keuangan sekolah. Rulistian & Tandean (2024) menunjukkan bahwa ARKAS berkontribusi terhadap efektivitas penganggaran sekolah. Sementara itu, Diantri et al. (2024) menyimpulkan bahwa ARKAS mampu mempermudah pengelolaan administrasi keuangan sekolah meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis. Selain itu, Hadiyanto et al. (2019) menunjukkan bahwa pengawasan dan keterlibatan pemangku kepentingan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Meskipun penelitian sebelumnya telah menjelaskan manfaat Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk perencanaan, pelaporan, efektivitas penganggaran, dan administrasi keuangan sekolah, penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan aplikasi ini sebagai alat administratif atau sistem teknis. Penelitian sebelumnya belum menganalisis Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagai instrumen *digital governance* yang diterapkan secara komprehensif dalam proses manajerial pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Analisis yang menghubungkan penggunaan aplikasi dengan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) di tingkat SMA juga terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tidak hanya sebagai aplikasi manajemen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen *digital governance* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Negeri 1 Padang.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: Bagaimana implementasi *digital governance* dalam pengelolaan dana BOS melalui ARKAS di SMAN 1 Padang dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *digital governance* dalam pengelolaan dana BOS melalui ARKAS dalam keempat aspek tersebut dan menjelaskan kontribusi serta kendala penerapannya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Studi kasus dipilih karena peneliti ingin mengkaji secara mendalam implementasi *digital governance* dalam pengelolaan dana BOS melalui ARKAS di SMAN 1 Padang. Fokus penelitian meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui aplikasi tersebut.

2. Setting Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Padang pada tahun 2025-2026. Sekolah ini beralamat di Jl. Belanti Raya, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa SMAN 1 Padang merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang telah menerapkan ARKAS dalam pengelolaan dana BOS dengan pengelolaan keuangan yang baik.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan dalam menetapkan fokus penelitian, menentukan informan, mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkan temuan, dan menarik kesimpulan. Instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, alat tulis, dan perangkat dokumentasi. Pedoman wawancara serta lembar observasi disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui aplikasi tersebut. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih informan yang paling memahami dan terlibat langsung dalam tata kelola dana digital BOS. Informan kunci (key informan) terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dana BOS, bendahara BOS sebagai pelaksana teknis keuangan, operator ARKAS sebagai pengelola sistem. Informan tambahan terdiri dari guru dan komite sekolah sebagai pihak pendukung dan pengawas. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, surat keputusan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah, dokumen pertanggungjawaban keuangan, bukti transaksi, laporan realisasi anggaran, dan tangkapan layar menu penganggaran, administrasi, dan pelaporan dalam aplikasi.

5. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, bendahara Bantuan Operasional Sekolah, operator aplikasi, guru, dan panitia sekolah untuk mendapatkan informasi tentang proses perencanaan, alokasi tugas, implementasi, pengawasan, dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi. Observasi non-partisipatif dilakukan dengan mengamati penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Observasi difokuskan pada tahap planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC) Terry & Franklin (2006), pihak-pihak yang menggunakan aplikasi, dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan bukti pendukung, seperti Rencana dan Anggaran Kegiatan Sekolah, surat keputusan dari tim manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah, laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, dokumentasi kegiatan yang didanai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah, dan tangkapan layar menu aplikasi.

6. Teknik Analisis Data

Miles & Huberman (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap reduksi

data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, diringkas, dan dibahas berdasarkan fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, temuan diorganisasikan menjadi deskripsi naratif berdasarkan tema perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan. Selanjutnya, kesimpulan dan verifikasi dilakukan berulang kali dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang konsisten.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi ahli. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, bendahara Bantuan Operasional Sekolah, operator aplikasi, guru, dan panitia sekolah. Triangulasi teknis dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi ahli dilakukan melalui konsultasi dengan supervisor dan pengujian untuk mendapatkan masukan guna memperkuat interpretasi data dan kredibilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *digital governace* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah di SMAN 1 Padang telah mendukung pengelolaan dana yang lebih sistematis, terdokumentasi, transparan, dan akuntabel. Implementasi ini terlihat pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat aspek ini dilakukan melalui keterlibatan kepala sekolah, bendahara Bantuan Operasional Sekolah, operator Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, guru, dan komite sekolah.

Pada aspek perencanaan, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dilakukan melalui identifikasi kebutuhan sekolah, mengadakan pertemuan dengan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah, menetapkan prioritas, dan memasukkan anggaran ke dalam aplikasi. Pada aspek pengorganisasian, sekolah membentuk tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah melalui keputusan kepala sekolah dan memberikan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Pada aspek pelaksanaan, penggunaan dana dilakukan melalui verifikasi berlapis, pembayaran non-tunai, administrasi, dan pelaporan. Dari segi pengawasan, sekolah melaksanakan pengawasan internal oleh kepala sekolah dan komite sekolah, serta pengawasan eksternal oleh dinas pendidikan dan inspektorat.

Berdasarkan wawancara dengan lima informan, observasi non-partisipatif, dan tinjauan dokumen pengelolaan dana BOS, data penelitian direduksi dengan memilih dan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan empat aspek implementasi *digital governance* yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil reduksi data kemudian dibandingkan di berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan temuan yang konsisten. Ringkasan hasil reduksi data disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Implemntasi *Digital Governance* dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Melalui ARKAS di SMAN 1 Padang

Aspek	Hasil penelitian	Makna implementasi <i>digital governance</i>
Perencanaan	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, mengadakan pertemuan dengan tim manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah, menetapkan prioritas berdasarkan rapor pendidikan dan delapan standar pendidikan, serta memasukkan anggaran ke dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.	Aplikasi ini mendukung perencanaan anggaran yang lebih terstruktur, berbasis kebutuhan, dan terdokumentasi

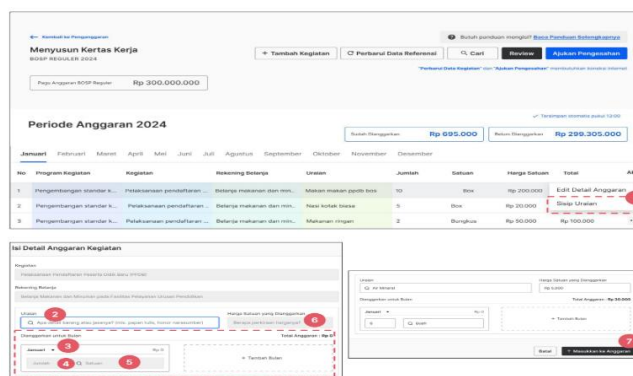
Aspek	Hasil penelitian	Makna implementasi <i>digital governance</i>
Pengorganisasian	Pengelolaan dana dilakukan oleh tim manajemen yang ditunjuk melalui keputusan kepala sekolah, dengan tugas yang dibagi antara kepala sekolah, bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah, operator aplikasi, guru, dan komite sekolah.	Aplikasi ini mendukung koordinasi, pembagian tugas, dan administrasi rutin pengelolaan dana.
Pelaksanaan	Penggunaan dana dilakukan melalui verifikasi berlapis, pembayaran non-tunai, pencatatan transaksi, administrasi, dan pelaporan melalui aplikasi.	Aplikasi ini mendukung pelacakan transaksi dan akuntabilitas penggunaan dana.
Pengawasan	Pengawasan dilakukan secara internal oleh kepala sekolah dan komite sekolah, serta secara eksternal oleh kantor pendidikan dan inspektorat melalui pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi, dan pelaporan.	Aplikasi ini menyediakan data dan dokumen yang mempermudah pengecekan kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.

Berdasarkan Tabel 1, implementasi *digital governance* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Aplikasi Rencana Kegiatan Sekolah dan Aplikasi Anggaran di SMAN 1 Padang terjadi di semua tahapan pengelolaan. Aplikasi ini berperan dalam mendukung ketertiban administrasi, dokumentasi anggaran, pencatatan transaksi, pelaporan, dan proses pemantauan. Namun, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh koordinasi waktu, kesiapan sumber daya manusia, stabilitas sistem, dan keselarasan pengeluaran komponen dengan kebutuhan sekolah.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana BOS Melalui ARKAS

Perencanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 1 Padang dilakukan secara sistematis dan partisipatif. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan setiap bidang di dalam sekolah. Kebutuhan yang diusulkan ini kemudian dibahas dalam rapat tim pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk menentukan program dan kegiatan prioritas.

Prioritas anggaran ditentukan dengan mempertimbangkan rapor pendidikan, data pendidikan dasar, delapan standar pendidikan, dan kebutuhan aktual sekolah. Setelah prioritas ditetapkan, operator Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah memasukkan rencana anggaran ke dalam aplikasi. Rencana tersebut dapat direvisi jika ada perubahan kebutuhan sekolah atau penyesuaian kebijakan dari dinas pendidikan, di mana seluruh proses penginputan komponen kegiatan tersebut diintegrasikan secara digital (lihat Gambar 1).



Sumber: Dokumentasi Penelitian
Gambar 1. Menu Penganggaran pada ARKAS

Proses ini menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah mendukung perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan. Pendokumentasian rencana kegiatan dan anggaran dalam sistem memfasilitasi penyesuaian anggaran sekolah sesuai dengan peraturan. Namun, masih terdapat beberapa kendala karena terbatasnya jumlah item pengeluaran yang tersedia dalam Harga Satuan Standar. Adnyani & Astawa (2023) menjelaskan bahwa penggunaan Rencana Kegiatan Sekolah dan Aplikasi Anggaran dapat meningkatkan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan perencanaan tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi, tetapi juga oleh keterlibatan tim manajemen dan penggunaan data kebutuhan sekolah sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Dana BOS Melalui ARKAS

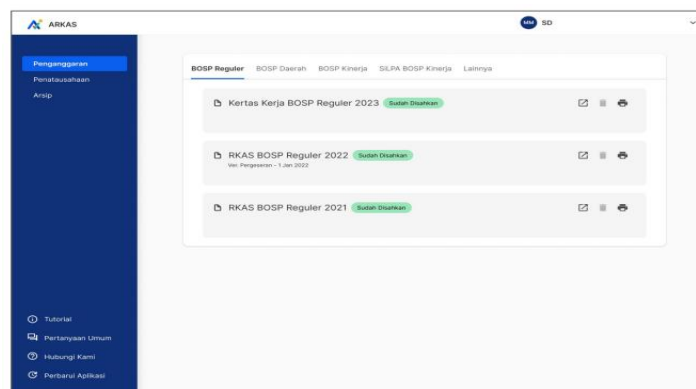
Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan melalui pembentukan tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah, yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala sekolah. Tim tersebut terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara Bantuan Operasional Sekolah sebagai pengelola keuangan, operator Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagai pengelola sistem, guru sebagai pengusul permintaan kegiatan, dan panitia sekolah sebagai pihak pendukung dan pengawas pengelolaan dana.

Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan peran masing-masing pihak. Kepala sekolah berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian, bendahara mengelola administrasi dan transaksi keuangan, operator memasukkan dan mengolah data dalam aplikasi, sementara guru dan panitia memberikan masukan dan pengawasan dalam wewenang masing-masing. Koordinasi dilakukan melalui rapat, komunikasi langsung, dan peninjauan dokumen sebelum kegiatan atau transaksi dilakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah membutuhkan struktur organisasi yang jelas dan koordinasi antar pihak. Aplikasi tidak dapat berjalan optimal jika hanya dikelola oleh operator, karena data anggaran, transaksi, dan laporan memerlukan keterlibatan pihak-pihak dengan tugas dan wewenang yang berbeda. Bush (2020) menyatakan bahwa efektivitas manajemen pendidikan dipengaruhi oleh struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas, koordinasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembagian peran yang jelas dan peningkatan kemampuan pengguna aplikasi merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan dana.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS Melalui ARKAS

Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola setelah anggaran disetujui dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Setiap penggunaan dana menjalani mekanisme verifikasi berlapis sebelum pembayaran dilakukan. Pembayaran dilakukan secara non-tunai, dan setiap transaksi dicatat dalam sistem untuk tujuan administrasi dan pelaporan akuntabilitas. Proses pencatatan transaksi digital dan penatausahaan ini dilakukan secara berkala oleh operator melalui sistem, sebagaimana ditampilkan pada menu utama penatausahaan aplikasi (lihat Gambar 2).



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 2. Menu Penatausahaan Dana BOS pada ARKAS

Penggunaan aplikasi ini membantu sekolah memastikan bahwa penggunaan dana selaras dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan, komponen pengeluaran, dan dokumen pendukung. Pencatatan transaksi digital juga memfasilitasi penyusunan laporan dan pelacakan anggaran. Dengan demikian, aplikasi ini mendukung ketertiban administratif dan akuntabilitas penggunaan dana, karena setiap transaksi harus diaudit dan dicatat dalam sistem.

Manajemen dana masih menghadapi beberapa tantangan. Keterlambatan pencairan dana karena surplus anggaran dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan program sekolah. Selain itu, keterbatasan item pengeluaran dalam Harga Satuan Standar dan gangguan teknis dalam aplikasi dapat mencegah beberapa kebutuhan sekolah untuk diakomodasi secara langsung dalam sistem. Wachyudin & Wardiah (2025) menjelaskan bahwa penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun terdapat tantangan teknis dan keterbatasan kemampuan pengguna. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi perlu disertai dengan koordinasi dan penyesuaian administratif ketika terjadi hambatan.

Tabel 2. Kendala Implementasi ARKAS dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 1 Padang

Kendala	Dampak terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah	Tindakan sekolah
Keterlambatan pencairan dana karena ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun (SILPA).	Pelaksanaan beberapa program dan kegiatan sekolah telah mengalami penyesuaian waktu.	Menyesuaikan jadwal kegiatan dan mengatur ulang prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan.
Batasan dalam pembelian barang dengan Harga Satuan Standar (SSH).	Beberapa kebutuhan sekolah tidak dapat dipenuhi secara langsung dalam perencanaan atau implementasi anggaran.	Menyesuaikan rencana pengeluaran dengan komponen yang tersedia dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Gangguan teknis pada aplikasi	Proses input, administrasi, atau pelaporan mengalami keterlambatan.	Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan lanjutkan proses setelah sistem kembali normal.

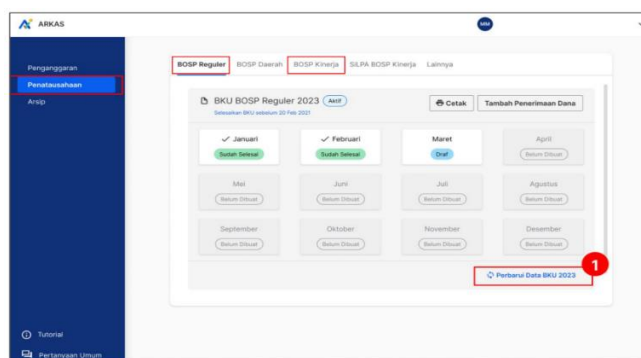
Tabel 2 menunjukkan bahwa kendala implementasi tidak hanya berkaitan dengan aplikasi tetapi juga dengan aspek administratif, ketersediaan komponen pengeluaran, dan kapasitas

pengguna. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi yang efektif memerlukan dukungan koordinasi berkelanjutan, pengembangan kapasitas pengguna, dan pengelolaan kendala teknis dan administratif yang tepat.

4. Pengawasan Pengelolaan Dana BOS melalui ARKAS

Pengawasan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 1 Padang dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah melalui peninjauan transaksi, dokumen pendukung, dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Komite sekolah juga berperan dalam memperoleh informasi dan memberikan pengawasan terhadap penggunaan dana. Pengawasan eksternal dilakukan oleh dinas pendidikan dan inspektorat melalui peninjauan laporan, rekonsiliasi, dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban.

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah mendukung pengawasan karena data anggaran, transaksi, dan laporan didokumentasikan. Hal ini memudahkan sekolah dan pengawas untuk membandingkan penggunaan dana yang direncanakan dan aktual. Aplikasi ini juga memperkuat ketertelusuran dokumen dan memfasilitasi proses verifikasi ketika ditemukan perbedaan, yang mana seluruh pencatatan Buku Kas Umum (BKU) dapat dipantau secara transparan melalui menu khusus dalam sistem (lihat Gambar 3).



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 3. Menu Pelaporan Anggaran pada Aplikasi ARKAS

Hadiyanto et al. (2019) menjelaskan bahwa pengawasan dan keterlibatan pemangku kepentingan merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem digital dapat memperkuat pengawasan melalui dokumentasi dan pelaporan yang lebih teratur. Namun, aplikasi ini tidak menggantikan peran kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, dan inspektorat dalam melakukan audit dan menindaklanjuti temuan pengawasan.

Secara keseluruhan, Aplikasi Rencana dan Anggaran Kegiatan Sekolah telah berfungsi sebagai alat tata kelola digital untuk mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 1 Padang. Aplikasi ini mendukung perencanaan berbasis kebutuhan, pengorganisasian melalui alokasi tugas, implementasi yang terdokumentasi, dan pengawasan yang lebih mudah dilacak. Keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, koordinasi tim, stabilitas sistem aplikasi, ketersediaan komponen anggaran, dan pengawasan yang efektif.

Pembahasan

1. Perencanaan Pengelolaan Dana BOS Melalui ARKAS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana BOS melalui ARKAS di SMAN 1 Padang dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis data. ARKAS disusun melalui identifikasi kebutuhan di setiap sektor, diskusi dalam rapat tim manajemen BOS, penetapan prioritas, dan penginputan anggaran ke dalam ARKAS. Dari segi perencanaan, RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran) tidak hanya dikembangkan oleh operator

ARKAS, tetapi juga melalui pengumpulan usulan kebutuhan dan diskusi dengan tim manajemen BOS. Seorang informan menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dilakukan melalui rapat tim, dengan kebutuhan sekolah sebagai dasar untuk memprioritaskan data sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi. Proses ini juga mengacu pada delapan standar pendidikan, rapor pendidikan, dan komponen pengeluaran yang tersedia di ARKAS. Dalam proses ini, sekolah menggunakan data Dapodik, laporan pendidikan, delapan standar pendidikan, dan kebutuhan setiap sektor sebagai dasar untuk menyiapkan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa ARKAS berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan pengendalian perencanaan berbasis kebutuhan, bukan hanya sebagai alat penginputan anggaran. Dalam proses ini, sekolah menggunakan data Dapodik, laporan pendidikan, delapan standar pendidikan, dan kebutuhan setiap sektor sebagai dasar penyusunan anggaran.

Temuan ini sejalan dengan Adnyani & Astawa (2023), yang menyatakan bahwa perencanaan berbasis ARKAS dilakukan dengan menyusun ARKAS berdasarkan kebutuhan aktual sekolah, hasil evaluasi, dan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan alokasi anggaran yang akurat. Penggunaan laporan pendidikan sebagai dasar penentuan prioritas anggaran menunjukkan bahwa alokasi dana BOS diarahkan untuk mendukung indikator pendidikan yang masih perlu ditingkatkan.

Penggunaan ARKAS dalam perencanaan juga mencerminkan penerapan prinsip tata kelola digital. Mergel et al. (2019) menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem digital dapat meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi melalui proses perencanaan yang lebih terstruktur, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Dalam penelitian ini, data kebutuhan sekolah diintegrasikan ke dalam Sistem Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sehingga rencana kegiatan dan anggaran dapat didokumentasikan secara lebih sistematis. Hal ini sejalan dengan temuan Afriansyah et al. (2026) yang menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan platform digital dalam ekosistem sekolah mampu mencapai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi karena alur kerja yang terstruktur dengan baik.

Criado et al. (2023) menjelaskan bahwa *digital governance* tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi tetapi juga mencakup perubahan dalam proses pengambilan keputusan berbasis informasi untuk menciptakan nilai publik. Sejalan dengan hal ini, Indrajit (2016) menyatakan bahwa tata kelola digital adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui sistem yang mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan publik secara lebih efektif. Penggunaan laporan pendidikan sebagai dasar penentuan prioritas anggaran menunjukkan bahwa keputusan mengenai alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada data objektif. Situasi ini mendukung penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Afriansyah & Sabandi (2026) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi di sekolah tidak akan optimal jika hanya mengandalkan pelatihan atau keterampilan teknis digital, tetapi harus diwujudkan dengan memperkuat budaya kerja organisasi. Dalam proses perencanaan BOS, aspek budaya kerja seperti tanggung jawab, koordinasi yang disiplin, dan komitmen profesional dari tim manajemen BOS merupakan penggerak utama (*enabler*) agar sistem digital seperti ARKAS dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan perencanaan yang akurat.

Lebih lanjut, ketentuan persentase anggaran dalam ARKAS mendorong sekolah untuk menyusun anggaran secara proporsional dan sesuai dengan peraturan. Temuan ini sejalan dengan Rulistian & Tandean (2024), yang menyatakan bahwa ARKAS membantu sekolah mengoptimalkan proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan dana BOS melalui ARKAS di SMAN 1 Padang disusun berdasarkan kebutuhan aktual sekolah dan didukung oleh penggunaan data sebagai dasar penentuan prioritas anggaran. Dengan demikian, data verifikasi menunjukkan bahwa perencanaan dana BOS di SMAN 1

Padang telah diarahkan pada kebutuhan nyata sekolah, meskipun masih perlu disesuaikan dengan ketentuan komponen pengeluaran dan jadwal revisi dari dinas pendidikan.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Dana BOS Melalui ARKAS

Pengelolaan dana BOS melalui ARKAS di SMAN 1 Padang telah dilakukan melalui pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Sekolah membentuk tim pengelolaan BOS melalui keputusan kepala sekolah. Tim tersebut terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, operator ARKAS, tim pengadaan barang dan jasa, guru, dan komite sekolah. Dari segi organisasi, pembagian tugas pengelolaan dana BOS telah ditetapkan melalui surat keputusan tim pengelola. Kepala sekolah sebagai informan menjelaskan, "Kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, bendahara BOS mengelola administrasi keuangan dan pembayaran, dan operator ARKAS bertanggung jawab untuk menginput semua kegiatan dan pelaporan ke dalam aplikasi." Kutipan ini menunjukkan bahwa penggunaan ARKAS didukung oleh pembagian peran yang jelas antara pengambil keputusan, mengelola administrasi keuangan, dan pengelolaan data digital. Observasi dan dokumentasi juga menunjukkan bahwa operator melakukan input, sementara bendahara mengelola administrasi sesuai arahan.

Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab, pengarah, dan pengawas pengelolaan dana BOS. Bendahara BOS bertanggung jawab mengelola administrasi dan transaksi keuangan, sedangkan operator ARKAS bertanggung jawab memasukkan dan mengolah data dalam aplikasi. Guru menyampaikan kebutuhan kegiatan di bidang masing-masing, sementara komite sekolah berperan dalam memberikan masukan dan melakukan pengawasan dalam wewenang mereka. Pembagian tugas ini didukung oleh koordinasi melalui rapat, komunikasi langsung, dan peninjauan dokumen sebelum kegiatan atau transaksi dilaksanakan.

Temuan ini sejalan dengan Terry & Franklin (2006), yang menyatakan bahwa organisasi adalah proses penugasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap anggota organisasi sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif. Penetapan pembagian tugas melalui keputusan tim manajemen BOS menunjukkan bahwa organisasi pengelolaan dana BOS tidak hanya bersifat informal tetapi telah di institusionalisasi secara administratif.

Bush (2020) menjelaskan bahwa efektivitas manajemen pendidikan dipengaruhi oleh struktur organisasi yang jelas, koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan kapasitas sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah, bendahara BOS, operator ARKAS, tim pengadaan barang dan jasa, guru, dan anggota komite sekolah memiliki peran yang saling melengkapi. Situasi ini mendukung kelancaran pengelolaan dana BOS berbasis digital karena setiap tahapan pengelolaan dilakukan oleh pihak-pihak dengan tugas dan wewenang yang sesuai.

Hallinger (2018) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh konteks organisasi dan kepemimpinan yang mampu mengkoordinasikan sumber daya secara efektif. Dalam penelitian ini, kepala sekolah berperan sebagai direktur dan pengawas untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana BOS berjalan sesuai peraturan. Koordinasi dari tingkat guru hingga tingkat kepala sekolah juga menunjukkan adanya mekanisme komunikasi yang mendukung pengelolaan keuangan sekolah.

Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan rekonsiliasi rutin menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ARKAS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia untuk mengoperasikan aplikasi, memahami peraturan, dan beradaptasi dengan pembaruan sistem. Wachyudin & Wardiah (2025) menyatakan bahwa pembagian tugas yang jelas dan kompetensi manajerial dapat membantu sekolah mengelola dana BOS dengan lebih tertib dan akuntabel. Oleh karena itu, struktur tim manajemen BOS di SMAN 1 Padang mendukung pengelolaan dana berbasis ARKAS melalui alokasi peran yang jelas, koordinasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, data verifikasi menunjukkan bahwa koordinasi dan pembagian tugas formal

membantu meminimalkan kesalahan administratif dan menjaga kelancaran pengelolaan dana BOS berbasis ARKAS.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS Melalui ARKAS

Pengelolaan dana BOS melalui ARKAS di SMAN 1 Padang dilakukan setelah anggaran disetujui di RKAS. Setiap penggunaan dana menjalani mekanisme verifikasi berlapis sebelum pembayaran dilakukan. Pembayaran dilakukan secara non-tunai, dan setiap transaksi dicatat dalam ARKAS untuk keperluan administrasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dari aspek pelaksanaan, realisasi dana BOS dilakukan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disetujui dan didukung oleh bukti transaksi, dokumentasi kegiatan, dan surat pertanggungjawaban. Informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan secara non-tunai, dengan realisasi transaksi diinput oleh operator berdasarkan bukti pembayaran. Proses ini menunjukkan bahwa ARKAS membantu membangun keterlacakan antara rencana anggaran, transaksi, dan pelaporan.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana selaras dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan, komponen pengeluaran, dan dokumen pendukung. Proses ini menunjukkan adanya pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOS. Temuan ini sejalan dengan Asifa & Afriansyah (2020), yang menyatakan bahwa administrasi dana BOS mencakup pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan sistematis untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik.

Pemanfaatan pembayaran non-tunai melalui ARKAS merupakan bentuk *digital governance* dalam pengelolaan keuangan sekolah. Transaksi yang dilakukan secara digital lebih aman, terdokumentasi, dan mudah dilacak. Pencatatan transaksi dalam sistem juga memudahkan sekolah dalam menyusun laporan keuangan dan mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan yang dapat terjadi pada sistem manual.

Mergel et al. (2019) menjelaskan bahwa sistem digital dapat meningkatkan efektivitas organisasi melalui otomatisasi proses administrasi. Dalam penelitian ini, ARKAS membantu sekolah dalam menghasilkan data dan laporan keuangan berdasarkan transaksi yang dimasukkan. Hal ini mempercepat proses administrasi dan pelaporan serta mendukung keteraturan administrasi keuangan sekolah.

Namun, implementasi pengelolaan dana BOS melalui ARKAS masih menghadapi beberapa tantangan. Keterlambatan pencairan dana akibat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat berdampak pada jadwal pelaksanaan program sekolah. Lebih lanjut, keterbatasan item pengeluaran dalam Standar Satuan Harga (SSH) berarti bahwa beberapa kebutuhan sekolah tidak dapat langsung diakomodasi dalam sistem. Gangguan teknis dalam aplikasi, khususnya selama pembaruan sistem, juga dapat menghambat proses input, administrasi, dan pelaporan. Apabila terjadi kendala, seperti keterlambatan pencairan dana akibat SILPA, keterbatasan barang di SSH, atau gangguan sistem, pihak sekolah melakukan koordinasi dan penyesuaian administratif agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Temuan ini sejalan dengan Diantri et al. (2024), yang menunjukkan bahwa implementasi ARKAS masih menghadapi tantangan teknis umum meskipun secara umum meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS. Kemampuan sekolah untuk berkoordinasi dan beradaptasi dengan tantangan yang muncul menunjukkan kapasitas organisasi untuk beradaptasi dengan manajemen keuangan digital. Dengan demikian, implementasi pengelolaan dana BOS melalui ARKAS telah mendukung proses yang lebih teratur, terdokumentasi, dan akuntabel, meskipun tantangan administratif dan teknis masih perlu diatasi. Dengan demikian, verifikasi data menunjukkan bahwa kendala teknis tidak menghilangkan fungsi akuntabilitas ARKAS, tetapi memerlukan koordinasi tim dan penyesuaian prosedur dalam pelaksanaannya.

4. Pengawasan Pengelolaan Dana BOS Melalui ARKAS

Pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS melalui ARKAS di SMAN 1 Padang dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah melalui peninjauan transaksi, dokumen pendukung, dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan RKAS. Komite sekolah juga berperan dalam memperoleh informasi dan melakukan pengawasan dalam kewenangannya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh dinas pendidikan dan inspektorat melalui peninjauan laporan, rekonsiliasi, dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban. Pada aspek pengawasan, data wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memeriksa kesesuaian transaksi dan dokumen pendukung sebelum pembayaran dilakukan, sementara pengawasan eksternal dilakukan melalui rekonsiliasi dan verifikasi laporan oleh dinas pendidikan dan inspektorat. Dokumentasi laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, dan menu penatausahaan ARKAS memperkuat informasi tersebut. Kesesuaian antara data wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada aplikasi, tetapi juga pada pemeriksaan substantif oleh pihak yang berwenang.

Temuan ini sejalan dengan Irzani et al. (2025), yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan pemanfaatan anggaran sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku melalui audit dan evaluasi berkala. Keterlibatan kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, dan inspektorat menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS menerapkan pengawasan internal dan eksternal di berbagai tingkatan.

Sistem pelaporan melalui ARKAS mencerminkan penerapan prinsip *digital governance* dalam proses pengawasan. Mergel et al. (2019) menjelaskan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dengan menyediakan data yang akurat, terdokumentasi, dan mudah diakses. Dalam penelitian ini, laporan realisasi anggaran, Buku Kas Umum, dan dokumen pendukung dapat dikompilasi dan disimpan lebih teratur melalui ARKAS. Hal ini mempermudah sekolah, dinas pendidikan, dan inspektorat dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan dana BOS.

Transparansi merupakan elemen penting tata kelola publik karena memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan sumber daya publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi didukung oleh pencatatan transaksi dalam ARKAS dan penyampaian informasi tentang penggunaan dana kepada para pemangku kepentingan di sekolah. Temuan ini sejalan dengan Meijer (2022), yang menyatakan bahwa transparansi digital memungkinkan informasi keuangan tersedia lebih cepat, akurat, dan mudah diakses melalui sistem digital.

Dari perspektif akuntabilitas, Agyemang & Broadbent (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen dan mekanisme pelaporan yang baik merupakan prasyarat penting untuk memastikan kinerja lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dicapai melalui verifikasi berlapis, dokumen administrasi yang lengkap, pencatatan transaksi, dan pelaporan rutin kepada dinas pendidikan dan inspektorat. Integrasi pemantauan, pelaporan, dan dokumentasi membantu memastikan bahwa penggunaan dana dapat dipantau, dipertanggungjawabkan, dan dievaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, pemantauan pengelolaan dana BOS melalui ARKAS di SMAN 1 Padang telah mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan bertingkat, ketersediaan data transaksi, dokumentasi lengkap, dan pelaporan yang lebih teratur. Namun, sistem digital ini masih memerlukan audit substantif dan tindak lanjut oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam aplikasi selaras dengan implementasi pengelolaan dana di sekolah. Dengan demikian, verifikasi data menunjukkan bahwa ARKAS memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui ketersediaan data yang

terdokumentasi, sementara pengawasan berjenjang memastikan data tersebut sesuai dengan realisasi penggunaan dana.

KESIMPULAN

Implementasi *digital governance* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di SMAN 1 Padang telah mendukung pengelolaan keuangan sekolah yang sistematis, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah mendukung penyusunan Bantuan Operasional Sekolah yang partisipatif dan berbasis data melalui pemanfaatan rapor pendidikan, data Dapodik, dan kebutuhan sekolah. Pengelolaan dana juga didukung oleh struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas formal, koordinasi antara tim pengelola dana BOS, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dalam implementasinya, ARKAS memfasilitasi pembayaran non-tunai, verifikasi berlapis, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan. Lebih lanjut, sistem pelaporan digital melalui ARKAS memperkuat pengawasan internal dan eksternal dengan menyediakan data dan dokumen yang dapat digunakan untuk memantau kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana.

Keberhasilan implementasi *digital governance* tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi digital, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan stabilitas sistem. Keterlambatan pencairan dana akibat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, keterbatasan item belanja dalam Standar Satuan Harga, dan kendala teknis aplikasi terus menghambat kelancaran pengelolaan dana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola, peningkatan koordinasi tim, dan peningkatan sistem diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan ARKAS.

Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa *digital governance* dalam pengelolaan dana pendidikan membutuhkan integrasi antara teknologi, tata kelola organisasi, dan kapasitas manajerial sekolah. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan masukan untuk pengembangan administrasi pendidikan dan manajemen keuangan sekolah berbasis teknologi digital, khususnya dalam meningkatkan administrasi, ketertelusuran anggaran, dan kualitas pengawasan.

REFERENSI

- Adnyani, K. Y., & Astawa, I. G. P. B. (2023). Analisis Penggunaan Sistem Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Terhadap Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(3), 359–367. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.62815>
- Afriansyah, H., Gistituati, N., Marsidin, S., Sabandi, A., & Widya, N. (2025). *Evaluating the Effectiveness of the All-in-One Dashboard System (AIODS) in Enhancing Vocational High School Management Evaluación de la Eficacia del Sistema de Panel de Control Todo en Uno (AIODS) para Mejorar la Gestión de los Institutos de Formación Profesional*. <https://doi.org/10.56294/dm20251159>
- Afriansyah, H., & Sabandi, A. (2026). *The Relationship Between Information and Communication Technology (ICT) Capabilities and Work Culture on the Performance of Public High School Teachers in Dharmasraya Regency*. 08(01), 52–63.
- Afriansyah, H., Sabandi, A., Widya, N., Afrizul, M. R., & Melani, S. P. (2026). *Effectiveness of an Expert System for Facilities Management in Vocational High Schools*. <https://doi.org/10.24036/kolokium.v14i1.1292>
- Agyemang, G., & Broadbent, J. (2023). Management control systems and research

- management in universities: An empirical and conceptual exploration. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 36(4), 920–939.
- Asifa, P., & Afriansyah, H. (2020). *Administrasi Keuangan*. Padang: OSF. Io.
- Bush, T. (2020). *Theories of Educational Management*.
- Criado, J. I., Guevara-Gómez, A., & Villodre, J. (2023). Digital governance and public value creation. *Government Information Quarterly*, 40(3), 101824.
- Diantri, S., Bani, M., Fatiqh, S., & Trihantoyo, S. (2024). Pengoperasian aplikasi RKAS dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 280–299.
- Hadiyanto, Famella, S., & Wiyono, B. B. (2019). The challenge of school operational assistance management in elementary schools. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(5), 421–432.
- Hallinger, P. (2018). Bringing context out of the shadows of leadership. *Educational Management Administration & Leadership*, 46(1), 5-24.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi.
- Irzani, E., Irsyad, & Setiawati, M. (2025). Teknik Identifikasi Resiko Keuangan di Lembaga Pendidikan. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(3), 3102–3108.
- Meijer, A. (2022). Digital transparency in the public sector. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101621.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation : Results from expert interviews ☆. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Alih Bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi*. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan. In *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. In *Jakarta*.
- Rulistian, R., & Tandean, V. A. (2024). Analisis Efektivitas ARKAS di SMP Islam Terpadu Ar-Rifqi. *Mount Hope International Business Journal*, 1(2), 13–24.
- Terry, G. R., & Franklin, S. G. (2006). *Principles of management* (8th ed.).
- Wachyudin, S., & Wardiah, D. (2025). Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kecamatan Mesuji. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4314–4329.